

LDII Wonogiri Dukung Hasil Munas

WONOGIRI (KR) - Jaringan DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kabupaten Wonogiri mendukung hasil Munas IX LDII tahun 2021 yang digelar di Jakarta 7-8 April 2021. "Kendati mengikuti proses musyawarah nasional dari jarak jauh atau daring, Pengurus Kabupaten LDII Wonogiri tetap serius dan khidmat mengikuti agenda lima tahunan DPP tersebut," kata Ketua DPD LDII Wonogiri, Sutoyo. Menurutnya, perhelatan Munas IX LDII di kompleks Ponpes Minhaajurrosyidin Jakarta Timur secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan ekstra ketat.

"Kami mendukung penuh hasil keputusan Munas yang telah menetapkan KH Ir Chriswanto Santoso MSc sebagai ketua umum baru, untuk periode lima tahun mendatang. Kami juga dukung kebijakan organisasi dalam upaya meningkatkan sinergi dan penguatan agenda nasional yang kini dilakukan pemerintah," ungkap Sutoyo di studio mini DPD LDII Wonogiri 'Citra Suhada' Kecamatan Jatisono. Ketua Wanhat LDII Kabupaten Wonogiri KH Suharto SPd selaku peserta Munas IX menuturkan, arahan Presiden Ir Joko Widodo (Jokowi) saat membuka musyawarah nasional sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini khususnya kondisi kalangan ormas Islam. "Oleh karena itu pengurus maupun warga LDII sebagai anak bangsa siap melaksanakan arahan presiden dalam hal melakukan dakwah di tengah kemajemukan bangsa," tegasnya. (Dsh)

PENYAMPAIAN KOMPLAIN LAYANAN Gunakan 'Aplikasi Polisiku'

TEMANGGUNG (KR) - Masyarakat yang ingin komplain terhadap pelayanan polisi tidak perlu lagi ke kantor polisi, tetapi cukup menggunakan Aplikasi Polisiku yang bisa diunduh di playstore. Kasubag Humas Polres Temanggung AKP Ari Sugeng mengatakan, ini merupakan layanan baru untuk pengaduan masyarakat. "Namanya Dumas Presisi di Aplikasi Polisiku. Ini merupakan layanan aduan. Masyarakat juga bisa melaporkan kinerja polisi," jelasnya. Menurutnya, masyarakat dalam melakukan komplain maupun melaporkan aduan tetap mengedepankan tata krama dan tidak memberikan laporan fiktif. Laporan masyarakat diharapkan untuk kemajuan dan perbaikan kinerja Polri ke depan sehingga harus riil dan akurat.

"Setiap laporan yang masuk akan didatakan. Namun ada sejumlah tahapan sebelum masyarakat memberikan laporan. Antara lain, pelapor harus menulis nomor induk kependudukan," ungkap AKP Ari Sugeng. Setelah melapor, lanjut Ari Sugeng, masyarakat bisa memantau perkembangan laporannya secara mudah, karena perkembangan kasus yang dilaporkan akan selalu di-update. "Sejauh mana laporan yang dimasukkan, sudah diproses apa belum dan seterusnya, bisa dipantau. Oleh sebab itu, masyarakat jangan ragu," tegasnya. AKB Ari Sugeng menambahkan, Kabidhumas Polda Jateng Kombes Iskandar Fitriana Sutisna juga berpesan kepada jajaran Polres untuk sosialisasi kepada masyarakat. (Osy)

OPTIMALKAN SUKOHARJO SEBAGAI LUMBUNG BERAS

Bupati-Wabup Pimpin Gropyokan Tikus

SUKOHARJO (KR) Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Wakil Bupati Sukoharjo Agus Santosa memimpin gropyokan tikus di area sawah Desa Pranan Kecamatan Polokarto, Jumat (9/4).

Petani diminta untuk menerapkan pola tanam dan panen serentak untuk menghindari serangan hama tikus. Gropyokan hama tikus dilakukan serentak untuk memaksimalkan hasil panen padi, mencegah Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah lumbung pangan nasional.

"Kegiatan gropyokan tikus seperti ini sangat penting dan sangat efektif untuk membasmi tikus sekaligus mengendalikan hama dalam waktu bersamaan. Selain itu, bisa memutus siklus perkembangbiakan hama yang bisa mengancam tanaman padi," ungkap Etik Suryani. Menurutnya, saat ini ti-

kus menjadi ancaman serius dan meresahkan petani, tidak hanya di Desa Pranan Kecamatan Polokarto tetapi juga wilayah lain.

Serangan hama tikus membuat tanaman padi rusak dan menurunkan produktivitas panen. Petani juga diharapkan menerapkan pola tanam serentak, untuk menekan serangan tikus sakukun gropyokan tikus menjelang tanam dan setelah panen padi.

Wakil Bupati Sukoharjo Agus Santosa menambahkan, gropyokan tikus juga sangat bermanfaat karena bisa menjaga semangat gotong royong. Kabupaten

Sukoharjo sebagai lumbung pangan nasional harus terus dijaga. "Pola tanam serentak dan gropyokan tikus bersama menjadi kunci penting untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi," tandasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Sukoharjo, Netty Harjianti, mengungkapkan, fenomena La Nina yang terjadi saat ini diprediksi akan mengakibatkan anomali cuaca berupa peningkatan curah hujan di Kabupaten Sukoharjo. Akibatnya, akan berkembang organisme pengganggu tanaman.

"Luas serangan organisme pengganggu tanaman komulatif tahun 2020 adalah, penggerek batang di lahan seluas 295 hektare, wereng batang cokelat di lahan 577 hektar, tikus di lahan 651 hektare, blast di lahan 16 hektar,

BLB 21 menyebar di lahan hektar.

"Serangan organisme pengganggu tanaman tersebut mengakibatkan puso seluas 6 hektar di Kecamatan Mojolaban dampak dari serangan hama tikus. Dinas Pertanian dan Per-

ikanan Sukoharjo mencatat serangan organisme pengganggu tanaman komulatif sampai dengan akhir Maret 2021 adalah, penggerek batang, wereng batang cokelat 64, tikus 180, dan BLB 46," jelas Netty Harjiani. (Mam)



KR-Wahyu Imam Ibad

Bupati Sukoharjo Etik Suryani dan Wakil Bupati Sukoharjo Agus Santosa memimpin kegiatan gropyokan tikus di area sawah Desa Pranan Kecamatan Polokarto.

GIBRAN JANJI BANTU CARIKAN DANA

Masjid Sriwedari Rampung Tahun Ini

SOLO (KR) - Pembangunan Masjid Taman Sriwedari (MTS) yang terhenti hampir satu tahun terakhir karena kesulitan pendanaan, diproyeksikan rampung pada akhir tahun ini. Bahkan pihak panitia pembangunan berharap sebelum pembangunan Masjid Syaikh Zayed hadiah dari Putera Mahkota Kerajaan Uni Emirat Arab (UEA) di Gilangan rampung, MTS sudah terselesaikan.

Ketua Pembangunan MTS, Achmad Purnomo mengatakan hal itu saat menerima kunjungan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka dalam rangkaian *mid-praja*. Proses pembangunan

sebenarnya telah mencapai 86 persen, tinggal menyisakan pekerjaan finishing. Namun saat ini panitia menghadapi persoalan pendanaan yang seluruhnya menggantungkan bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR). "Masih ada kekurangan sekitar Rp 160 miliar, termasuk kewajiban melunasi biaya pembangunan yang ditalangi pihak pelaksana," jelasnya.

Pada awal pembangunan tahun 2018 silam, jelas mantan Wakil Walikota Solo itu, banyak perusahaan memberikan kesanggupan menyalurkan CSR masing-masing, hingga hitungan di atas ker-

tas, seluruh kebutuhan dana telah tercukupi. Namun pandemi virus corona (covid-19) pencairan CSR dari banyak perusahaan tertunda hingga saat ini. Kendati begitu, panitia optimistis seluruh kebutuhan dana akan tertutup, sebab Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka telah menyanggupi membantu pencarian dana.

Walikota Gibran Rakabuming Raka menyebutkan, kekurangan biaya akan dicarikan melalui sumbangan pribadi maupun CSR. Dalam kaitan itu, dia meminta panitia lebih aktif berkeliling mencari CSR, sedangkan dirinya akan mendukung dan mengawal

proses pengumpulan bantuan tersebut.

Mengenai kemungkinan Pemkot Solo mengucurkan bantuan, Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Ahyani menyebutkan, sejauh ini seluruh pembangunan MTS mengandalkan CSR. Hingga saat ini Pemkot Solo juga belum mengalokasikan anggaran untuk membantu penyelesaian MTS.

"Semua bergantung panitia pembangunan, tambahannya, kalau pun memerlukan bantuan pendanaan dari Pemkot Solo, kemungkinan bisa direalisasikan melalui mekanisme hibah," tandasnya. (Hut)

HUKUM

9 Motor Ditelantarkan di Area Balap Liar



KR-Abdul Alim

Sembilan motor diamankan di Satlantas Karanganyar.

KARANGANYAR (KR) - Petugas Satlantas Polres Karanganyar mengamankan sembilan unit sepeda motor yang ditinggal kabur pemiliknya di Jalan Raya Solo-Sragen, tepatnya di depan SPBU Waru Kebakkramat, Sabtu (10/4). Diduga kuat, pemiliknya berkaitan aksi balap liar di area itu. Mereka tak sempat menaiki sepeda motornya karena polisi keburu datang.

"Kami mendapat laporan masyarakat dan pengguna jalan mengenai adanya indikasi balap liar di SPBU Waru atau Grompol. Anggota kami yang ada di Pos Sroyo dan petugas Kebakkramat bereser ke tempat tersebut dan berniat membubarkan balap liar yang dilakukan anak-anak muda," kata KBO Satlantas Polres Karanganyar, Iptu Anggoro Wahyu Setiabudi, Minggu (11/4).

Awalnya, petugas memang berencana membubarkan balap liar di depan SPBU tersebut, sekitar pukul 03.00 WIB. Mobil patroli melaju lambat ke lokasi tanpa menyalakan rotator dan sirine. Namun belum sampai ke sana, pebalap liar dan para penontonnya kabur. Diduga, mereka sudah mendapat in-

formasi keberadaan polisi sejak dari kejauhan. Sudah terlanjur ketahuan, polisi langsung mempercepat laju patroli sambil menyalakan rotator dan sirine.

Anggoro mengatakan, aksi balap liar di area itu diduga sering dilakukan. Meski demikian, polisi sulit menangkap basah mereka. "Ada yang berjaga dari lokasi yang jauh. Itu dugaan kami. Saat polisi mau mendekati, sudah ada kode dari rekannya. Tiba-tiba saja bubar saat polisi datang," ujarnya.

Menurutnya, balap liar di jalan raya sangat membahayakan jiwa pelaku maupun pengguna jalan lainnya. Dicurigai lima lokasi sering dipakai yakni depan SPBU Waru, Ringroad Mojosoongo, Popongan, Jambangan, dan sekitar Waduk Lalung.

Mengenai sembilan sepeda motor yang diamankan, ia mempersilakan pemiliknya mengambil di kantor Satlantas. Ia mendengar, mereka penonton balap liar. "Mungkin kocar-kacir. Lalu bonceng daripada mengambil motor dengan risiko tertangkap polisi. Aksi balap liar sangat dilarang apalagi Ramadan nanti," ujarnya. (Lim)

OPERASI PEKAT DI SUKOHARJO

6 Pasangan Tak Resmi Ditangkap di Hotel

SUKOHARJO (KR) - Tim gabungan melakukan operasi penyakit masyarakat (Pekat) dengan sasaran praktik prostitusi atau pasangan mesum. Kegiatan digelar dalam rangka cipta kondis menjelang bulan Ramadan.

Hasil operasi pekat, petugas menangkap enam pasangan tidak resmi berada di kamar hotel. Satu pasangan di antaranya masih berstatus pelajar. Operasi serupa akan terus digencarkan petugas gabungan.

Kepala Satpol PP Sukoharjo, Heru Indarjo, Jumat (9/4), mengatakan operasi pekat digelar bersama petugas gabungan Satpol PP, Polres dan Kodim 0726 Sukoharjo. Kegiatan digelar pada Kamis (8/4) di sejumlah hotel wilayah Kabupaten Sukoharjo seperti di Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Mojolaban.

Dasar pelaksanaan operasi pekat dilakukan tim gabungan adalah Perda Kabupaten Sukoharjo No 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila, Perbup Kabupaten Sukoharjo No 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Sukoharjo No 21 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila. Operasi pekat digelar petugas tim gabungan dengan membagi

dua tim. Tim satu melakukan operasi pekat di wilayah Kecamatan Sukoharjo dan tim dua di Kecamatan Mojolaban. Petugas dalam kegiatan tersebut melakukan pemeriksaan identitas terhadap tamu hotel. Selain itu juga mengecek barang yang dibawa apakah membawa benda membahayakan atau dilarang.

Hasil operasi pekat didapati tim satu menemukan lima pasangan tidak resmi berada dalam satu kamar. Petugas memastikan status mereka dari identitas dan keterangan tamu atau orang tersebut. Kelima pasangan bukan suami istri tersebut kemudian dibawa petugas untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan.

Tim dua dalam operasi pekat juga menemukan satu pasang anak muda masih berstatus pelajar dan dua wanita Open Booking via online. Mereka tidak bisa berkulit saat ditangkap petugas di hotel tersebut. Semuanya kemudian dibawa petugas untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut.

DIVONIS 1,6 TAHUN PENJARA

Ditangkap Setelah Kabur Selama 16 Tahun

PATI (KR) - Tim Intel Kejaksaan Negeri Pati (Jateng) akhirnya berhasil meringkus mantan Kepala PD BPR BKK Dukuhseti, Hendro. Warga Desa Keboromo Kecamatan Tayu tersebut, menjadi terpidana dengan hukuman 1 tahun 6 bulan dalam kasus tipikor, namun kabur selama 16 tahun.

"Terpidana ditangkap di rumah asalnya, di desa Kenanti Kecamatan Dukuhseti" jelas Kajari Pati, Mahmudi, Jumat (8/4).

Salam penjelasannya kepada pers, Mahmudi mengatakan, Hendro terjerat perkara Tahun 2006 atas kasus Tipikor dan sudah diputus Mahkamah Agung (MA). "Terpidana belum

bisa dieksekusi pidana penjara karena kabur keluar Jawa" ujarnya.

Setelah kejaksaan minta bantuan ke Monitoring Centre (MC) Kejaksaan Agung, akhirnya tim mendapat informasi bahwa terpidana berada di Pati, sehingga langsung dilakukan eksekusi penangkapan.

Terpidana Hendro merupakan Kepala PD BPR BKK Dukuhseti pada Tahun 1998/1999. Lelaki tersebut terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalurkan kredit yang tidak sesuai prosedur, yakni dengan mengatasnamakan orang lain. Sehingga merugikan PD BPR BKK Pati sebesar Rp 200 juta. Selanjutnya, berdasarkan putu-

san PN Pati p 27 April 2005, Hendro dinyatakan bersalah. Putusan tersebut dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi 4 Agustus 2005, dan putusan Kasasi MA 28 Juli 2006. Hendro terbukti melanggar Pasal 1 ayat (1), subside sub a jo Pasal 34 UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3A ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam perkara yang sama, petugas Kejaksaan Pati masih memburu KSM warga Sarirejo dan AA penduduk desa Kutoharjo. (Cuk)